



## BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : S- 1218 /K/SU/2019  
Lampiran : Satu set  
Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Kepala BPKP

27 Desember 2019

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
  2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  3. Para Gubernur ✓
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka pengisian jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapak/Ibu untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pengisian jabatan calon Kepala BPKP. Adapun ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam Lampiran Surat ini dan diunduh melalui *website* kami di [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

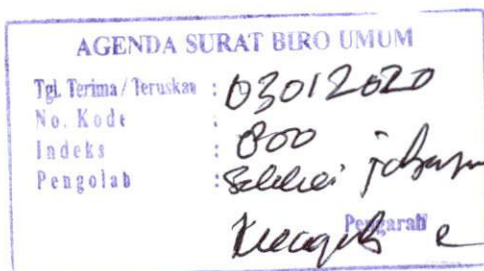
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaksana Tugas Kepala BPKP,



Iswan Elmi

NIP. 19600127 198102 1 001



Lampiran 1  
Surat Nomor S-1218/K/SU/2019  
Tanggal 27 Desember 2019

### DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Pertahanan
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Kantor Staf Kepresidenan
36. Sekretariat Kabinet

37. Arsip Nasional Republik Indonesia
38. Badan Intelijen Nasional
39. Badan Kepegawaian Negara
40. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
41. Badan Koordinasi Penanaman Modal
42. Badan Informasi Geospasial
43. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
44. Badan Narkotika Nasional
45. Badan SAR Nasional
46. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
47. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
48. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
49. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
50. Badan Pengawas Obat dan Makanan
51. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
52. Badan Pusat Statistik
53. Badan Tenaga Nuklir Nasional
54. Lembaga Administrasi Negara
55. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57. Lembaga Sandi Negara
58. Perpustakaan Nasional
59. Badan Pemeriksa Keuangan
60. Badan Standarisasi Nasional
61. Lembaga Ketahanan Nasional
62. Badan Keamanan Laut
63. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
64. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
65. Ombudsman Republik Indonesia
66. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
67. Badan Pengawas Pemilu
68. Komisi Pemberantasan Korupsi
69. Komisi Pemilihan Umum
70. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
71. Badan Ekonomi Kreatif
72. Pemerintah Aceh
73. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
74. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
75. Pemerintah Provinsi Riau
76. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
77. Pemerintah Provinsi Jambi
78. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
79. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

80. Pemerintah Provinsi Bengkulu
81. Pemerintah Provinsi Lampung
82. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
83. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
84. Pemerintah Provinsi Banten
85. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
86. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
87. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
88. Pemerintah Provinsi Bali
89. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- ✓ 90. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
91. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
92. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
93. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
94. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
95. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
96. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
97. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
98. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
99. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
100. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
101. Pemerintah Provinsi Gorontalo
102. Pemerintah Provinsi Maluku
103. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
104. Pemerintah Provinsi Papua Barat
105. Pemerintah Provinsi Papua



## BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-1/PANSELJPTU/BPKP/1/2019

TENTANG

SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka pengisian jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2020, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan:

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV
3. Berpengalaman di bidang pengawasan minimal 10 (sepuluh) tahun.
4. Jabatan dan usia:
  - a. Sedang atau pernah menduduki JPT Madya atau JF jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun.
  - b. Berusia maksimal 58 tahun per 1 Maret 2020.
5. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
7. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Telah menyerahkan LHKPN atau LHKASN dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan satu tahun terakhir.
10. Menandatangani Pakta Integritas.
11. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
12. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan atau hukuman pidana, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dua tahun terakhir.
13. Mengikuti uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang/teknis yang diselenggarakan melalui tahapan tes seleksi administrasi, penilaian rekam jejak calon, tes penulisan makalah, *assessment*, tes kesehatan, tes presentasi makalah dan wawancara.

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara daring. Petunjuk pengisian lamaran daring dapat dilihat melalui *website* [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).
2. Lamaran dilengkapi dengan *scan* dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat lamaran bermaterai yang telah ditandatangani;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan atau hukuman pidana, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dua tahun terakhir;
  - d. Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik;
  - e. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - f. Pakta integritas yang telah ditandatangani.
  - g. Ijazah terakhir;
  - h. Hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
  - i. Tanda terima pengiriman LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan satu tahun terakhir;
  - j. SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir;

- k. SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
- l. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6.

Format dokumen butir 2a s.d. 2f dapat diunduh melalui *website* [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

3. Lamaran harus sudah diterima oleh Panitia Seleksi paling lambat tanggal 6 Januari 2020 pukul 23.59 WIB.

C. Tahapan dan Jadwal

No	Nama Kegiatan	Waktu
1.	Pendaftaran	23 Desember s.d. 6 Januari 2020
2.	Penelusuran Rekam Jejak	7 s.d 22 Januari 2020
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 Januari 2020
4.	Tes Penulisan Makalah	9 Januari 2020
5.	Pengumuman Hasil Penilaian Makalah	13 Januari 2020
6.	<i>Assessment</i> dan Tes kesehatan	15 s.d 16 Januari 2020
7.	Presentasi Makalah dan Wawancara	23 Januari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	23 Januari 2020

Catatan:

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui email atau *website* [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

D. Deskripsi Jabatan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
  11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
  12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
  14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- E. Standar Kompetensi Jabatan
- Standar Kompetensi Managerial dan Sosio Kultural bagi Kepala BPKP merujuk Permenpan Nomor 38 Tahun 2017.
  - Standar Kompetensi Teknis BPKP terlampir
- F. Lain-lain
1. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi.
  2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
  3. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka BPKP berhak membatalkan hasil seleksi.
  4. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
  5. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
  6. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran secara online, harap menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi JPT Utama nomor telepon 081318472678 atau email Pansel.JPTBPKP@bpkp.go.id

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2019

PANITIA SELEKSI,  
Ketua,

Ttd.

DWI WAHYU ATMAJI